

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Moldova

Nur Rohim Yunus \*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5i4.38443](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i4.38443)

### Abstract:

Moldova is a unitary country located in the region of Southeastern Europe. Moldova's governmental structure incorporates features from both presidential and parliamentary systems, wherein the president wields overarching administrative authority while parliament assumes a significant part in shaping political determinations. The government of Moldova is comprised of three distinct parts of power, namely the executive, legislative, and judicial branches. The president, in their capacity as the head of state, assumes responsibility for foreign, defense, and security policy, whilst the prime minister assumes leadership of the administration and is accountable for the execution of policies. The Moldovan parliament, comprising two houses, possesses the jurisdiction to enact legislation, oversee the government, and execute additional legislative duties. Furthermore, Moldova possesses territories with distinct autonomy, namely Gagauzia and Transnistria, so introducing intricacy to the nation's governmental framework.

**Keywords:** Moldova; Form of state; Form of government; Government system

---

\* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Email: [nurrohimyunus@uinjkt.ac.id](mailto:nurrohimyunus@uinjkt.ac.id).

## A. PROLOG

Republik Moldova terletak di wilayah tenggara Eropa, antara perbatasan barat Rumania dan perbatasan timur Ukraina. Selama Abad Pertengahan, Moldova adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian bertransisi menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Wilayah ini mengalami transformasi pada abad ke-19, awalnya bergabung dengan Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Republik Moldova mencapai kemerdekaannya pada tahun 1991 setelah bubarnya Uni Soviet.<sup>1</sup>

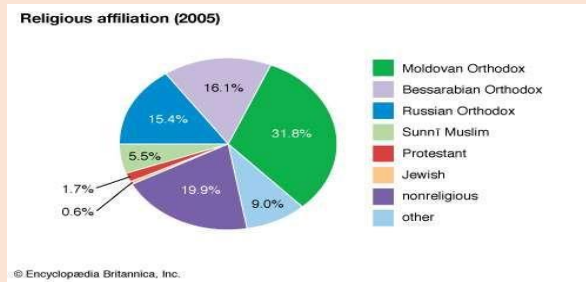


Ibu kota dan kota terbesar Moldova adalah Chisinau. Chisinau, yang terletak di wilayah tengah Moldova, berfungsi sebagai pusat utama kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di negara tersebut. Moldova (Rumania) adalah bahasa resmi Moldova, yang memiliki kemiripan dengan bahasa Rumania yang digunakan di Rumania. Bahasa Rusia adalah bahasa yang digunakan secara luas di negara ini. Afiliasi agama yang dominan di Moldova adalah Ortodoks Timur, dengan Gereja Ortodoks Moldova memegang posisi gereja terbesar di negara tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UNGUREANU, A., & CÂRNAȚ, T. (2023). The Particulars of the Constitutional Litigation Process in the Republic of Moldova. *ACROSS*, 7(5), 158-164.

<sup>2</sup> Railean, P. (2012). The Role of Constitutional Review in the Process of Building the Rule of Law-Experience of the Constitutional Court of the Republic of Moldova. *Const. L. Rev.*, 5, 197.



Moldova adalah republik parlementer yang beroperasi di bawah sistem multi-partai. Presiden menjabat sebagai kepala eksekutif, sedangkan perdana menteri memegang posisi kepala eksekutif. Moldova telah mengalami ketidakstabilan politik dan perselisihan internal, terutama perselisihan mengenai wilayah Transnistria, sejak memperoleh kemerdekaan.<sup>3</sup>

Moldova, sebuah negara yang terletak di Eropa, memiliki status sosial ekonomi yang sangat rendah, sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri skala kecil. Emigrasi pekerja ke negara-negara Eropa Barat memainkan peran penting dalam perekonomian Moldova, karena pengiriman uang yang diterima dari para pekerja ini berfungsi sebagai sumber pendapatan penting bagi negara.

Moldova adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan

---

<sup>3</sup> Prisac, A. (2023). The Inadmissibility of the Duality of the Exclusive General Competence of the Constitutional Court of the Republic of Moldova in Relation to the Powers of the Courts. *Annals Dunarea Jos Univ. Galati: Legal Sciences*, Fascicle, 6, XXVI.

Kerjasama di Eropa (OSCE), serta memiliki hubungan yang dekat dengan Uni Eropa dan NATO.



Moldova menghadapi banyak kendala, seperti korupsi, kesenjangan ekonomi, sengketa wilayah, dan migrasi skala besar. Negara ini secara aktif terlibat dalam upaya untuk meningkatkan integrasinya dengan Uni Eropa, sekaligus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga di kawasan, khususnya Rusia. Perselisihan yang sedang berlangsung mengenai Transnistria, sebuah entitas politik yang memproklamkan otonominya dari Moldova pada tahun 1990-an, terus menjadi masalah yang belum terselesaikan dalam urusan dalam negeri dan internasional Moldova.<sup>4</sup>

Moldova adalah republik konstituen Uni Soviet dari tahun 1940 hingga 1991. Selanjutnya, Moldova berupaya membangun rasa terlepas dari pengaruh Rusia dan meningkatkan hubungannya dengan negara-negara Barat, yaitu Uni Eropa. Namun demikian, mayoritas penduduk masih berkomunikasi dalam bahasa Rusia, dan terdapat bias politik dan budaya yang lebih memilih orang Rusia di Moldova. Pernyataan di atas menjelaskan warisan sejarah yang rumit antara Moldova dan Rusia, yang terus-menerus

---

<sup>4</sup> Sirbu, S. (2022). Promotion of Laws by the President of the Republic of Moldova. *Studii Juridice Universitare*, 183.

membentuk dinamika politik dan sosial di negara tersebut.<sup>5</sup>

Pasca kemerdekaannya, Moldova segera mulai menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di Eropa. Moldova tergabung dalam Dewan Eropa, PBB, OSCE, North Atlantic Cooperation Council, WTO, IMF, Bank Dunia, Francophonie dan European Bank for Reconstruction and Development. Moldova juga berupaya menemukan penyelesaian damai atas krisis di Transnistria dengan meminta bantuan mediator internasional untuk mencapai tujuan ini.

Republik Moldova memiliki konstitusi sebagaimana negara-negara berdaulat lainnya, dan menjadi acuan dalam bernegara. Konstitusi Republik Moldova disahkan pada tanggal 29 Juli 1994. Moldova adalah republik demokratis dengan sistem multipartai, dan konstitusi ini menetapkan status tersebut bagi negara tersebut. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak kelompok minoritas merupakan beberapa elemen utama yang tercakup dalam konstitusi ini. Aspek penting lainnya termasuk pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, konstitusi mengakui bahasa resmi Moldova

---

<sup>5</sup> Toader, T., & Safta, M. (2011). The Relationship of the Constitutional Court with Parliament and the Government (General Report at the XVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts Bucharest, Romania, 23-25 May, 2011). Constitutional Justice. Functions and relationship with the other public authorities. Publishing House Monitorul Oficial.

sebagai bahasa negara dan memberikan wilayah seperti Gagauzia dan Transnistria wewenang untuk mengatur dirinya sendiri secara independen. Proses legislasi yang dituangkan dalam konstitusi sendiri juga memungkinkan adanya perubahan konstitusi.<sup>6</sup>

Budaya Moldova merupakan perpaduan pengaruh budaya Rumania dan Soviet. Identitas budaya Rumania muncul sebagai hasil penggabungan unsur budaya Romawi dan Dasia, yang selanjutnya ditambah dengan pengaruh signifikan budaya Slavia selama Abad Pertengahan. Figur penting dalam perkembangan budaya Moldova adalah Varlaam, Dosoftei, Grigore Ureche, Miron Costin, Petru Movilă, Nicolae Milescu-Spătaru, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce, Gavriil Bănulescu-Bodoni, Alexandru Hîjdău, Alexandru Donici, Constantin Stamati, Costache Negruzzi, Bogdan P. Hasdeu, Ion Creangă dan Mihai Eminescu.<sup>7</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Negara Moldova dan implikasinya dalam Pembagian Wilayah**

Moldova adalah negara kesatuan. Hal ini menyiratkan bahwa pemusatan kekuasaan

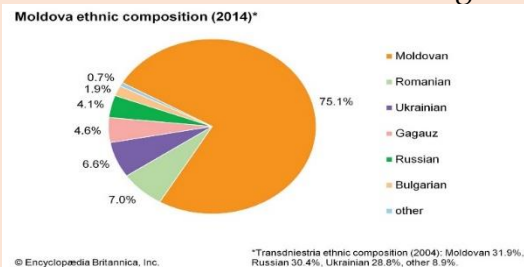
---

<sup>6</sup> Урсу, В. (2023). The European legal framework of environmental policy and its impact on the criminal legislation of Republic of Moldova. Аналітично-порівняльне правознавство, (5), 671-676.

<sup>7</sup> ТУРЛОВА, Ю. (2016). Кримінально-правова охорона довкілля у законодавстві країн Європейського Союзу. Jurnalul juridic national: teorie și practică, 17(1/2), 92-95.

pemerintahan terjadi pada tingkat nasional, dimana pemerintah pusat mempunyai yurisdiksi untuk merumuskan penilaian dan kebijakan yang dapat diterapkan secara universal di seluruh negara. Meskipun wilayah seperti Gagauzia dan Transnistria diberi otonomi pada tingkat tertentu, pemerintah pusat di Chisinau memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting dan merumuskan kebijakan. Dalam struktur negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan daerah atau lokal.

Struktur negara kesatuan Republik Moldova menghasilkan pembagian wilayah yang sistematis, di mana otoritas dan keputusan kebijakan penting dipusatkan pada pemerintah pusat yang berlokasi di Chisinau. Sebagai konsekuensinya, Moldova telah mencapai standar yang konsisten dalam administrasi, hukum, dan kebijakan. Meskipun wilayah tertentu, seperti Gagauzia dan Transnistria, telah diberikan otonomi pada tingkat tertentu, pemerintahan negara secara keseluruhan masih sangat dipengaruhi dan



diarahkan oleh mekanisme pemerintahan nasional.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Kálmán, K., & Szentgáli-Tóth, B. A. (2022). New Perspectives on Comparative Constitutional Law: Methodological Bases and

Fenomena pembagian wilayah yang sistematis juga terlihat dalam bidang administrasi publik, karena Moldova dipartisi menjadi distrik-distrik atau entitas administratif lainnya, yang diawasi oleh administrasi lokal yang ditunjuk oleh pemerintah nasional. Untuk menjaga konsistensi dalam tata kelola dan penegakan hukum di seluruh negara, struktur ini menjamin penerapan kebijakan dan peraturan yang sama di seluruh wilayah.

Moldova terbagi menjadi 32 distrik (raionul), tiga munisipalitas (Bălți, Kishinev, Bender) dan dua wilayah otonom (Gagauzia dan Transnistria). Terdapat 65 kota dan 917 komune di Moldova.<sup>9</sup>

Berikut adalah daftar distrik di Moldova: Anenii Noi, Basarabesca, Briceni, Cahul, Cantemir, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Strășeni, Șoldănești, Ștefan, Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni. Status akhir Transnistria dan Gagauzia masih dipersengketakan karena pemerintah pusat tidak menguasai wilayah tersebut.<sup>10</sup>

---

Challenges—Establishing a Global Database from the Practice of Constitutional Review During the Pandemic. MTA LAW WORKING PAPERS, 2022(20).

<sup>9</sup> Lupușor, A., Cenușă, D., & Romaniuc, R. (2013). Republic of Moldova 2013. State of the country report. Chisinau: Expert-Grup, 55.

<sup>10</sup> Afanas, N. (2013). National Security of the Republic of Moldova in the Context of European Integration Process. *Eurolimes*, (15), 59-74.



Kerangka konstitusional Republik Moldova dibedakan dengan pemberian otonomi khusus asimetris pada wilayah Gagauzia dan Transnistria dalam pembagian wilayahnya. Status otonom kedua wilayah ini diberikan oleh konstitusi Moldova, sehingga membedakannya dari wilayah lain di negara tersebut.



Gagauzia, yang terletak di selatan Moldova, adalah wilayah yang dihuni oleh mayoritas etnis Gagauz. Berdasarkan Perjanjian Gagauzia yang ditandatangani pada tahun 1994, Gagauzia diberikan status otonom yang luas, termasuk dalam hal budaya, pendidikan, dan bahasa. Wilayah ini memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki hak untuk mengadopsi undang-undang lokal yang relevan dengan wilayah mereka.<sup>11</sup>



Transnistria adalah wilayah yang secara de facto memisahkan diri dari Republik Moldova setelah konflik bersenjata pada awal 1990-an. Meskipun statusnya belum diakui secara internasional, Transnistria memiliki otoritas

---

<sup>11</sup> Albu, N. (2016). The Republic of Moldova in the Context of the Ukrainian Crisis: Vulnerabilities and Threats. Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine, 128, 154.

pemerintahan sendiri yang meliputi legislasi, keamanan, dan urusan luar negeri. Wilayah ini memiliki struktur pemerintahan yang terpisah, termasuk parlemen dan presiden sendiri.

Kedua wilayah ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam sistem otonominya yang asimetris, yang menunjukkan upaya mereka untuk memenuhi persyaratan dan preferensi yang berbeda dari banyak etnis minoritas di Republik Moldova. Meskipun Gagauzia dan Transnistria memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah lain di Moldova, masih ada kendala yang harus diatasi agar kedua wilayah ini dapat bergabung dengan baik ke dalam kerangka negara Moldova yang lebih besar.

## **2. Bentuk Pemerintahan Moldova dan implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat**

Sistem politik Republik Moldova dicirikan sebagai republik dan bukan monarki. Dalam konteks republik, pelaksanaan otoritas politik berada di tangan rakyat atau wakil-wakil mereka yang dipilih, dan kepala negara biasanya adalah presiden atau kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kepala negara Republik Moldova adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sebaliknya, dalam sistem monarki, penguasa adalah raja yang memegang jabatan melalui suksesi atau warisan secara turun-temurun, dan bukan dipilih oleh rakyat. Moldova, sebagai negara republik, sangat menekankan gagasan bahwa otoritas

politiknya berasal dari rakyat dan dipegang oleh para pemimpin yang dipilih secara demokratis.<sup>12</sup>

Parlemen Republik Moldova memegang tingkat keterwakilan tertinggi di negara tersebut dan berfungsi sebagai satu-satunya otoritas legislatif. Badan ini beroperasi sebagai struktur unikameral, dengan 101 wakil yang dipilih berdasarkan daftar untuk jangka waktu empat tahun. Parlemen dipilih melalui proses pemungutan suara yang luas, adil, langsung, rahasia, dan tidak terbatas. Proses pemilihan Presiden Parlemen Republik Moldova melibatkan minimal 52 suara yang diberikan oleh parlemen.

Mahkamah Konstitusi Republik Moldova, atas usulan Komisi Pemilihan Umum Pusat, memutuskan sah atau tidaknya mandat wakil. Amanat tersebut tidak sah jika terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu.<sup>13</sup>

Parlemen bersidang atas permintaan Presiden Republik Moldova dalam waktu 30 hari setelah pemilihan. Mandat DPR diperpanjang hingga sidang sah komposisi baru. Selama periode ini, Konstitusi tidak dapat diubah dan undang-undang organik

---

<sup>12</sup> Shamatava, N. Parliamentary oversight of the executive branch in three newly established Parliamentary systems: Georgia, Kyrgyzstan and Moldova.

<sup>13</sup> de Politici Publice, I. NATIONAL SECURITY AND DEFENSE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA.

tidak dapat diadopsi, diamandemen atau dicabut.<sup>14</sup> Parlemen Republik Moldova adalah penerus Soviet Tertinggi SSR Moldavia.

Pada musim semi tahun 1990, pemilihan parlemen pertama diadakan di Moldova berdasarkan prinsip-prinsip baru, berdasarkan sistem pemilihan mayoritas. Calon wakil diusulkan oleh kolektif buruh dan organisasi publik. Jumlah mereka bervariasi dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan lainnya; dari 2 hingga 20 orang. Setelah pemilu, 371 deputi dipilih di Soviet Tertinggi SSR Moldavia dari badan legislatif ke-12, yang sebagian besar didukung dalam kampanye pemilu oleh formasi politik baru - Front Populer Moldova, Gerakan "Persatuan - Edinstvo", dan oleh Partai Komunis Moldova.<sup>15</sup>

Pada tanggal 23 Mei 1991, berdasarkan keputusan Soviet Tertinggi SSR Moldavia pada badan legislatif ke-12, bekas republik serikat, SSR, berganti nama menjadi Republik Moldova, dan Soviet Tertinggi menjadi Parlemen pertama Republik Moldova. Pada tanggal 23 Juni 1990, Parlemen mengadopsi Deklarasi Kedaulatan, dan pada tanggal 27 Agustus 1991 – Deklarasi Kemerdekaan Republik Moldova. Undang-undang mengenai Tiga Warna

---

<sup>14</sup> Konstitusi Republik Moldova , pasal. 63, halaman 16. Ludwikowski, R. R. (1996). Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Duke University Press.

<sup>15</sup> Kurtskhalia, A. (2022). The aspects of international law on the regulation of territorial conflicts: the case of Republic of Moldova and Georgia. Thesis for obtaining the scientific degree of doctor in law.

sebagai Bendera Negara, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Republik Moldova juga diadopsi.

Selama kegiatan Parlemen pertama, bentuk pemerintahan berubah dari parlementer menjadi presidensial, yang ditetapkan dengan diperkenalkannya jabatan Presiden Republik Moldova dan pelaksanaan pemilihannya.

Menyusul krisis parlemen yang akut, pada tanggal 12 Oktober 1993 Parlemen dari badan legislatif ke-12 membubarkan diri, namun sebelum menetapkan tanggal pemilihan parlemen awal pada tanggal 27 Februari 1994. Juga, undang-undang pemilu yang baru diadopsi, yang kemudian diubah dari undang-undang pemilu. sistem pemilihan mayoritas ke proporsional, dan diperkirakan akan terjadi pengurangan jumlah wakil menjadi 104 orang. Kemudian, menurut pasal 60 ayat (2) Konstitusi Republik Moldova, yang diadopsi pada tanggal 29 Juli 1994, jumlah mandat di Parlemen dikurangi menjadi 101.<sup>16</sup>

### **3. Sistem Pemerintahan Moldova dan Implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan**

Sistem pemerintahan Moldova merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer. Hal ini berarti bahwa presiden mempunyai

---

<sup>16</sup> SOSNA, A., & GHERMAN, I. (2022). Protection Of Ownership In The Republic Of Moldova, Ukraine, European Union. Comparative Legal Aspect. *Верховенство Права*, 73.

wewenang administratif tertinggi, namun pada saat yang sama, parlemen memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan politik.



Presiden Moldova, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, mempunyai otoritas eksekutif yang besar. Presiden dipilih melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum, dengan masa jabatan lima tahun. Meskipun presiden mempunyai kewenangan khusus dalam urusan eksekutif, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Presiden memikul tanggung jawab atas perumusan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan negara, dan mempunyai kekuasaan untuk mengabulkan atau mencabut undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif.<sup>17</sup>

Perdana menteri menjabat sebagai kepala eksekutif dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan sehari-hari pemerintah. Kekuasaan eksekutif dalam mengatur pemerintahan negara berada di tangan perdana menteri dan kabinetnya, yang dipilih oleh parlemen. Meskipun presiden memegang kekuasaan eksekutif utama, perdana menteri mempunyai peran penting dalam

---

<sup>17</sup> Tabachnik, M. (2019). *Citizenship, territoriality, and post-soviet nationhood: the politics of birthright citizenship in Azerbaijan, Georgia, and Moldova*. Springer.

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Sistem politik Moldova dicirikan oleh struktur presidensial, di mana presiden memegang otoritas eksekutif yang besar. Namun, masuknya perdana menteri dan kabinetnya memperkenalkan unsur parlementer ke dalam sistem pemerintahan, dimana parlemen mengambil peran penting dalam membentuk keputusan politik.

Dalam sistem pemerintahan Presidensial Republik Moldova, presiden mempunyai posisi dominan dalam lembaga kepresidenan. Presiden adalah kepala negara dan mempunyai kekuasaan eksekutif tertinggi, yang memberinya pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan negara.

Di bawah sistem ini, presiden memiliki kekuasaan untuk:<sup>18</sup>

Pertama: Menetapkan kebijakan luar negeri. Presiden memiliki yurisdiksi untuk bertindak sebagai wakil negara di panggung global dan melaksanakan kebijakan luar negeri.

Kedua: Kepemimpinan dalam urusan pertahanan dan keamanan. Presiden memikul tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan

---

<sup>18</sup> Slusareno, S., & Vladiceanu-Starsii, L. (2023). Functions and Powers of the President of the Republic of Moldova through the Prism of the Judicial Practice of the Constitutional Court of the Republic of Moldova. *Intellectus*, 68.

negara, yang mencakup penentuan penting yang berkaitan dengan angkatan bersenjata.

Ketiga: Mempertimbangkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Presiden mempunyai wewenang untuk memberikan atau menolak persetujuan terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif, namun hak veto presiden dapat digantikan oleh mayoritas besar di parlemen.

Keempat: Pengangkatan pejabat pemerintahan. Presiden mempunyai kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri dan beberapa pejabat penting pemerintah lainnya, meskipun beberapa penunjukan mungkin memerlukan persetujuan parlemen.

Sistem pemerintahan Presidensial di Republik Moldova dicirikan oleh peran penting presiden dalam lembaga kepresidenan. Hal ini membedakannya dengan sistem parlementer, dimana perdana menteri dan kabinetnya memegang pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Perdana Menteri Republik Moldova berperan sebagai kepala eksekutif dan memiliki peran penting dalam melaksanakan tujuan pemerintahan sehari-hari.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Crowther, W., & Roper, S. D. (2013). A comparative analysis of institutional development in the Romanian and Moldovan legislatures. In *The new parliaments of Central and Eastern Europe* (pp. 133-160). Routledge.





Perdana menteri, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, mengambil alih kepemimpinan kabinet dan memikul tanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah di seluruh wilayah administratif. Perdana menteri mempunyai peran penting dalam pengembangan kebijakan pemerintah di berbagai bidang, meliputi perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bidang terkait lainnya. Tanggung jawab utama perdana menteri adalah memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah.

Penting bagi perdana menteri untuk membina hubungan positif dengan parlemen dan mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk inisiatif dan kebijakan pemerintah. Selain itu, ia diperkirakan akan menjaga komunikasi rutin dengan parlemen dan berpartisipasi dalam sesi parlemen untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi terkini mengenai kinerja pemerintah. Perdana menteri sering kali menjabat sebagai wakil pemerintah baik di dalam negeri maupun di panggung global. Ia berperan sebagai perwakilan negara di banyak platform nasional dan internasional, terlibat dalam pertukaran diplomatik dengan para pemimpin asing untuk memajukan

kepentingan Moldova dan membina hubungan bilateral.<sup>20</sup>

Tanggung jawab utama perdana menteri adalah memastikan bahwa kinerja pemerintah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Individu bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai kinerja departemen dan lembaga pemerintah, dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian pemerintah.

Fungsi perdana menteri dalam pemerintahan Republik Moldova sangatlah penting, karena mereka bekerja sama erat dengan presiden dan parlemen untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan negara.



### C. EPILOG

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Republik Moldova menjadi negara merdeka. Namun demikian, sisa-sisa sejarah Uni Soviet terus membayangi Moldova, khususnya dalam hal

---

<sup>20</sup> Tabachnik, M. (2017). *Defining the Nation in Russia's Buffer Zone: The Politics of Birthright Citizenship in Azerbaijan, Moldova and Georgia*. University of California, Santa Cruz.

pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan yang diberikan oleh Rusia, penerus langsung Uni Soviet.

Meskipun Moldova berupaya untuk meningkatkan kedaulatannya dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa dan negara-negara Barat, pengaruh Rusia yang luas masih terlihat jelas di beberapa bidang politik dan ekonomi negara tersebut. Hal ini terutama terlihat dalam perselisihan internal yang terus berlanjut yang diwujudkan melalui gerakan separatis Transnistrian, yang menyebabkan wilayah tersebut secara efektif memutuskan hubungan dengan Moldova dan mendapatkan dukungan dari Rusia.

Konflik yang sedang berlangsung ini menjadi pengingat akan hambatan besar yang terus dihadapi Moldova dalam upayanya mencapai stabilitas internal dan reformasi politik yang komprehensif. Terlepas dari dedikasi Moldova yang tak tergoyahkan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur komunikasi terbuka dan negosiasi diplomatik, rumitnya situasi ini menyoroti banyaknya pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk mencapai resolusi yang langgeng dan harmonis.

Oleh karena itu, meskipun Moldova memiliki kedaulatan, Moldova menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengatasi masalah internal dan mengurangi pengaruh eksternal, khususnya dari Rusia, yang terus menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai stabilitas dan kemajuan.

## REFERENSI:

- Afanas, N. (2013). National Security of the Republic of Moldova in the Context of European Integration Process. *Eurolimes*, (15), 59-74.
- Albu, N. (2016). The Republic of Moldova in the Context of the Ukrainian Crisis: Vulnerabilities and Threats. *Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine*, 128, 154.
- Crowther, W., & Roper, S. D. (2013). A comparative analysis of institutional development in the Romanian and Moldovan legislatures. In *The new parliaments of Central and Eastern Europe* (pp. 133-160). Routledge.
- de Politici Publice, I. National Security and Defense of The Republic of Moldova.
- Kálmán, K., & Szentgáli-Tóth, B. A. (2022). New Perspectives on Comparative Constitutional Law: Methodological Bases and Challenges—Establishing a Global Database from the Practice of Constitutional Review During the Pandemic. *MTA LAW WORKING PAPERS*, 2022(20).
- Konstitusi Republik Moldova, pasal. 63
- Kurtskhalia, A. (2022). *The aspects of international law on the regulation of territorial conflicts: the case of Republic of Moldova and Georgia*. Thesis for obtaining the scientific degree of doctor in law.
- Ludwikowski, R. R. (1996). *Constitution-making in the region of former Soviet dominance*. Duke University Press.

- Lupușor, A., Cenușă, D., & Romaniuc, R. (2013). Republic of Moldova 2013. State of the country report. Chisinau: Expert-Grup, 55.
- Prisac, A. (2023). The Inadmissibility of the Duality of the Exclusive General Competence of the Constitutional Court of the Republic of Moldova in Relation to the Powers of the Courts. *Annals Dunarea Jos Univ. Galati: Legal Sciences*, Fascicle, 6, XXVI.
- Railean, P. (2012). The Role of Constitutional Review in the Process of Building the Rule of Law- Experience of the Constitutional Court of the Republic of Moldova. *Const. L. Rev.*, 5, 197.
- Shamatava, N. Parliamentary oversight of the executive branch in three newly established Parliamentary systems: Georgia, Kyrgyzstan and Moldova.
- Sirbu, S. (2022). Promotion of Laws by the President of the Republic of Moldova. *Studii Juridice Universitare*, 183.
- Slusareno, S., & Vladiceanu-Starsii, L. (2023). Functions and Powers of the President of the Republic of Moldova through the Prism of the Judicial Practice of the Constitutional Court of the Republic of Moldova. *Intellectus*, 68.
- SOSNA, A., & GHERMAN, I. (2022). Protection Of Ownership In The Republic Of Moldova, Ukraine, European Union. *Comparative Legal Aspect. BEPCHOBEHCTBO ППABA*, 73.
- Tabachnik, M. (2017). Defining the Nation in Russia's Buffer Zone: The Politics of Birthright

- Citizenship in Azerbaijan, Moldova and Georgia. University of California, Santa Cruz.
- Tabachnik, M. (2019). *Citizenship, territoriality, and post-soviet nationhood: the politics of birthright citizenship in Azerbaijan, Georgia, and Moldova*. Springer.
- Toader, T., & Safta, M. (2011). *The Relationship of the Constitutional Court with Parliament and the Government (General Report at the XVth Congress of the Conference of European Constitutional Courts Bucharest, Romania, 23-25 May, 2011)*. Constitutional Justice. Functions and relationship with the other public authorities. Publishing House Monitorul Oficial.
- Ungureanu, A., & Cârnaț, T. (2023). The Particulars of the Constitutional Litigation Process in the Republic of Moldova. *ACROSS*, 7(5), 158-164.
- ТУРЛОВА, Ю. (2016). Кримінально-правова охорона довкілля у законодавстві країн Європейського Союзу. *Jurnalul juridic national: teorie și practică*, 17(1/2), 92-95.
- Урсу, В. (2023). The European legal framework of environmental policy and its impact on the criminal legislation of Republic of Moldova. *Аналітично-порівняльне правознавство*, (5), 671-676.